

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data Realisasi Anggaran yang terdapat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) perwakilan Jawa Timur. Total sampel yang digunakan peneliti adalah 114 selama tahun 2013-2017. Berdasarkan hasil regresi linier berganda dan pembahasan yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Temuan angka signifikan dapat disimpulkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Kemandirian daerah kemandirian daerah tidak berpengaruh secara signifikan dengan Belanja modal dengan hubungan berlawanan. Kemandirian daerah tidak berpengaruh secara positif terhadap Belanja modal disebabkan porsi PAD hanya kecil dari total pendapatan.
2. Dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Dari segi pendapatan dana alokasi umum (DAU) mampu memberikan pengaruh terhadap belanja daerah. Sedangkan untuk mempengaruhi yang lebih spesifik seperti belanja modal, dana alokasi umum (DAU) yang bersifat umum (tidak adanya kriteria-kriteria dari pemerintah pusat) hanya

mampu memberikan pengaruh yang kecil dan masih belum mampu memberikan kontribusi terhadap alokasi belanja modal. Karena banyaknya tanggapan masyarakat bahwa dana alokasi umum (DAU) hanya untuk menutupi devisa anggaran dari pemerintah daerah provinsi. Dengan terjadinya hal tersebut membuat pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap alokasi belanja modal masih belum maksimal terhadap pembangunan sektor ekonomi.

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga yang menguji pengaruh DAK terhadap Alokasi Belanja Modal didapatkan kesimpulan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat yang menguji DBH terhadap alokasi Belanja Modal didapatkan kesimpulan bahwa DBH berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal.
5. Hasil pengujian hipotesis kelima yang menguji SiLPA terhadap alokasi belanja modal didapatkan kesimpulan bahwa SiLPA tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal.

5.2 Keterbatasan

Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti memiliki keterbatasan yang dapat menjadi bahan pembelajaran untuk peneliti yang akan datang, yaitu :

1. Informasi yang peneliti dapatkan kurang mendetail atau bisa dikatakan kurang transparan, karena sewajarnya informasi mengenai penerimaan dan

kegunaan APBD dapat dipublikasikan supaya masyarakat dapat mengetahui alokasi APBD di kabupatennya/kota.

2. Dalam penelitian ini terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang nilainya $< 0,05$.

5.3 Saran

Dari keterbatasan serta kekurangan yang ada pada penelitian saat ini, maka peneliti memiliki saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan referensi, yaitu :

1. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya diharapkan peneliti menggunakan populasi yang lebih luas yaitu diluar Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
2. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independent diluar variabel independent penelitian ini seperti pertumbuhan ekonomi bias untuk dijadikan tambahan variabel.
3. Pemerintah diharap dapat mempublikasikan seluruh laporan keuangan supaya masyarakat dapat mengetahui alokasi APBD di kabupaten/kota.

DAFTAR RUJUKAN

- Darwanis, I. M. (2017). Pengaruh Sisa Lebih Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Perubahan Belanja Modal. *Jurnal Ekonomi Manajemen & Bisnis*, Vol.8 No.2 , 191-196.
- Data Kabupaten/Kota Jawa Timur www.bpkp.go.id. Diakses pada tanggal 15 September 2018 pukul 08.00
- Dewi, N. H. U. (2015). Adaptability Fair Value Accounting at The Public Company in Indonesia. *PEOPLE: International Journal of Social Sciences*. Vol. 1, No. 1, hal 754-770.
- Fahlevi, S. S. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Studi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol.1 No.1, 183-191.
- Indriantoro, Nurdan Bambang Supomo. 2012. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
- Indriantoro, Nur., Bambang Supomo, 2009. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Imam, G. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kemenkeu Minta Pemda Perbaiki Kualitas Belanja APBD www.ekbis.sindonews.com. Diakses pada tanggal 15 September 2018 pukul 06.37.
- Laila Murhani, N. d. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Prespektif Ekonomi Darusalam*, Vol.4 No.1, 1-18.
- Luh Putu Rani Mayasari, N. K. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, Vol.2 No.1, 1-11.

- Mahsun, Mohamad, 2012, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Miftahul Abid, S. d. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal e-proceeding of Management*, Vol.5 No.1, 753-759.
- Pariani, F. S. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, Vol. 6 No. 1, 1-13.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK: 6/2007 Tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Putri, H. S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi*, Vol.1 No.3, 1-19.
- Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Sugiyanta. (2016). Analisis Belanja Modal dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Vol.14 No.1, 19-40.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulardi, F. A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Alokasi Belanja Modal . *Jurnal Akuntansi*, Vol.6 No.1, 40-51.

Tyas Pramesti, T. T. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, Vol.23 No.4, 1-18.

Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

Wandira, A. G. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal . *Accounting Analysis Journal*, Vol.2 No.1, 45-50.

